

2024
T A H U N

BAKESBANGPOL

**PEDOMAN
TEKNIS**
BANGGA ONLINE

Pemerintah Kabupaten Bogor

I. Pendahuluan

Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. Penggunaan komputer dan handphone tidak hanya sebatas untuk bekerja dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat lainnya. Dengan hanya duduk di depan gawai, kita bisa menjelajah dunia, mencari semua informasi hanya dengan ketukan jari.

Tidak terkecuali dengan dunia pemerintahan. Trend digital ini juga ikut berkembang. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud.

Pertama, ketersediaan sistem yang terpadu. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat pemerintah pusat. Kedua, menempatkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar tujuan SPBE dapat tepat sasaran dan tepat guna.

Ketiga, harus dilakukan secara berkesinambungan. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Jangan sampai hanya dijadikan "trend" saja, setelah itu diabaikan.

Tujuan dari dibentuknya SPBE dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ini juga sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dimana terdapat delapan area perubahan yang mewakili setiap program perubahan. Salah satu yang berkaitan dengan SPBE adalah Penataan Tatalaksana.

Dalam penataan Tatalaksana, penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintah. Tidak hanya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, namun juga tata kelola internal didalam pemerintahan. Agar efektif, efisien, dan kinerja pemerintahan meningkat.

Dalam Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2024, penerapan SPBE juga diukur dalam beberapa indikator. Beberapa diantaranya seperti: apakah dalam kementerian/lembaga/pemerintah telah menerapkan manajemen layanan SPBE, menerapkan layanan kepegawaian berbasis elektronik, menerapkan layanan kearsipan berbasis elektronik, dan menerapkan layanan publik berbasis elektronik. Keseluruhan indikator ini harus

terpenuhi, karena memberi pengaruh besar dalam pencapaian Reformasi Birokrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah tersebut.

Selain penerapan SPBE dalam aspek internal manajemen pemerintahan, pengaruh SPBE ini juga membawa dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan. Banyak inovasi layanan publik yang berbasis teknologi informasi membawa dampak positif bagi masyarakat.

Pertama, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Masyarakat tidak harus datang ke instansi pemerintah sebagai pemberi layanan, cukup dengan mengakses halaman yang sudah dikelola oleh pemerintah, baik website atau media sosial, masyarakat sudah bisa mengetahui informasi dasar mengenai layanan yang diberikan, serta mengisi form aplikasi yang telah di sediakan.

Kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan informasi yang disajikan secara terbuka melalui teknologi informasi, masyarakat mudah mengetahui SOP, persyaratan, biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, pungli dan sebagainya. Ketiga, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi, misalnya dengan membentuk sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Dengan diterapkannya transformasi digital dalam pemerintahan, mampu memberikan nilai manfaat yang optimal, baik pada bidang administrasi pemerintahan, maupun pada bidang pelayanan publik. Sehingga mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

II. Latar Belakang

Penggunaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi mulai meningkat dan menjalin interaksi masyarakat luas. Penggunaan teknologi terutama internet diterapkan untuk media sosial, kepentingan bisnis, dan lain-lain. Masalah kecepatan layanan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat selama ini ialah mengenai ketidakjelasan prosedur layanan, ketidakprofesionalan aparatur dan menyebabkan masyarakat harus datang lebih dari satu kali, maraknya pungutan liar, serta biaya dan waktu yang tidak pasti terselesaikannya proses perizinan.

Permasalahan di atas juga dialami oleh pengguna layanan Bakesbangpol Kabupaten Bogor yang sebagian besar berasal dari akademisi (mahasiswa, dosen, LPPM universitas, dsb). Layanan dokumen yang dibutuhkan mereka adalah perizinan penelitian, izin PKL/KKN, izin wawancara, izin pengambilan data, izin survei maupun riset. Proses pemberian izin dilakukan secara manual/ konvensional dimana pihak yang memerlukan surat izin harus datang langsung ke Kantor Bangkesbangpol Kabupaten Bogor. Hal ini tentunya akan memakan waktu dan terkadang proses kepengurusan tidak dapat dilakukan dalam satu hari, disebabkan ada dokumen yang tidak lengkap. Padahal pihak yang melakukan kepengurusan surat izin ada yang berasal dari lokasi yang cukup jauh lataknya dari Kabupaten Bogor.

Menyikapi kondisi tersebut Bakesbangpol Kabupaten Bogor membuat terobosan baru dengan menerapkan sistem perizinan berbasis teknologi informasi (online) untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi memenuhi kebutuhan publik yang semakin bertambah dan mengatasi permasalahan tersebut.

Bakesbangpol Kabupaten Bogor menerapkan sistem daring dan sistem perizinan online Yang merupakan sistem aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi (web) dan diberi nama BANGGA ONLINE. Aplikasi berbasis website ini melayani pendaftaran, penelusuran proses perizinan dan pemantauan/ distribusi mahasiswa yang akan melakukan penelitian/PKL/KKN.

Penerapan sistem daring membantu masyarakat (khususnya kalangan akademisi) mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat karena pengajuan surat dilakukan secara online yang bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Penggunaan peralatan teknologi diharapkan dapat mengatasi kendala ruang dan waktu.

III. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan pelayanan publik dalam kepengurusan surat izin penelitian/riset/PKL/KKN dll.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat
- b. Memberi kemudahan layanan perizininan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas layanan
- d. Mempercepat proses perizinan
- e. Menghindari kepengurusan yang berulang disebabkan dokumen yang tidak lengkap

B. Manfaat

1. Efisiensi waktu dan biaya
2. Dapat mempermudah dalam mengurus berbagai jenis perizinan riset, penelitian, KKN/PKL
3. Memudahkan petugas BAKESBANGPOL melakukan distribusi dan monitoring perizinan riset, penelitian, KKN/PKL
4. Memudahkan petugas BAKESBANGPOL melakukan penyimpanan data perizinan riset, penelitian, KKN/PKL

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

1. Kegiatan Pokok

Bakesbangpol Kabupaten Bogor memberikan pelayan publik kepada masyarakat (akademisi) dalam perizinan riset, penelitian, KKN/PKL dll melalui pemanfaatan teknologi informasi secara online tanpa harus datang ke Kantor Bakesbangpol. Penggunan dapat

mengakses situs web <https://bakesbangppol-bogorkab.web.app/>, mengisi data dan mengupload berkas yang dibutuhkan. Jika berkas yang diminta terpenuhi persyaratannya maka pengguna akan diberikan surat rekomendasi yang akan dikirim kantor Bakesbangpol melalui email atau nomor whatsapp yang terdaftar.

2. Rincian Kegiatan

1. Perancangan website
2. Pengelolaan website
3. Verifikasi data
4. Surat rekomendasi

V. Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan melakukan sosialisasi kepada universitas/ perguruan tinggi terkait tentang fungsi, manfaat dan tatacara penggunaan aplikasi BANGGA ONLINE di Kantor Bakesbangpol Kabupaten Bogor. Selanjutnya dilakukan ujicoba dengan didampingi petugas Bakesbangpol. Jika terdapat kesulitan dalam mengakses BANGGA ONLINE, dapat mengajukan pertanyaan/ informasi langsung via telp/ whatsapp ke Bakesbangpol Kabupaten Bogor.

Prosedur penggunaan aplikasi BANGGA ONLINE terdiri dari:

1. Buka website BANGGA ONLINE di alamat <https://bakesbangppol-bogorkab.web.app/>
2. Memilih pilihan permohonan izin yang ingin diajukan (penelitian/KKN/PKL /dll)
3. Klik menu persyaratan (jika persyaratan sudah lengkap, bisa melakukan permohonan izin)
4. Klik Menu Jenis Izin (jika lokasi penelitian/KKN/PKL masih di wilayah Kabupaten Bogor, maka klik dalam daerah dan jika diluar kabupaten Bogor maka klik luar daerah). Selanjutnya akan diarahkan ke menu untuk entri data persyaratan
5. Isi dengan lengkap setiap data/ dokumen yang dibutuhkan.
6. Klik kirim dan data akan masuk ke email Pribadi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan untuk selanjutnya akan diverifikasi dan difasilitasi sesuai dengan aturan yang berlaku
7. Surat akan jadi dalam tenggang waktu maksimal 3 hari kerja dan pemohon bisa mengambilnya secara langsung ke Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor (Apabila dalam masa PPKM darurat akan langsung dikirim berbentuk softcopy ke alamat email / nomor Whatsapp pemohon)

VI. Sasaran

Semua pengguna (akademisi) yang ingin melakukan penelitian atau PKL/KKN.

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan

A. Tahapan Inovasi BANGGA ONLINE

No.	Tahapan	Waktu Kegiatan	Keterangan
1.	Latar Belakang Masalah	10 Juni 2024	Ketidakefektifan dalam kepengurusan izin penelitian, PKL/KKN
2.	Perumusan Ide	25 Juni 2024	Perumusan ide dari masukan semua pihak / koordinasi dengan Kepala Badan
3.	Perancangan	30 Juni 2024	Menyusun tim pengelola inovasi dan linsek
4.	Implementasi	2 Juli 2024	Sosialisasi dan implementasi aplikasi BANGGA ONLINE

B. Pelaksanaan Kegiatan BANGGA ONLINE

Pelaksanaan program inovasi bisa dilalukan setiap hari dan akan difasilitasi segera di hari kerja

VIII. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

1. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi website yang akan dikelola dan jumlah data yang masuk dari para pengguna yang mendaftar. Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dari subbag dan disampaikan ke BAKESBANGPOL.

2. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan di seluruh kampus dan sekolah sasaran, lalu hasilnya disampaikan ke Kepala BAKESBANGPOL.

Cibinong, Juli 2024
Mengetahui Kepala Badan



Drs Bambang Widodo Tawekal M. Si
NIP. 196802141989031008